PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis yang terletak di antara dua benua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang terpisah antara satu dengan yang lain, tentu saja memiliki adat istiadat, kebiasaan, serta keanekaragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Perbedaan budaya daerah terlihat pada aspek-aspek geografis, etnis sosial kultural, agama serta kepercayaan-kepercayaan yang melekat pada masyarakat tertentu.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa; negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, dimana ada kelompok masyarakat maka disana lahir kebudayaan. Kebudayaan mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain (Syahrial S. Rusdiyanta, 2009 : 106). Bangsa Indonesia sudah memiliki hukum tersendiri sebelum kodifikasi hukum nasional yang merupakan aktualisasi dari nilai-nilai kebudayaan. Kebudayaan mengandung nilai-nilai religi dan pesan-pesan moral yang

kemudian lahir menjadi sebuah hukum atau norma, berlaku secara terbatas dalam ruang lingkup kelompok masyarakat tertentu, oleh karena itu kebudayaan menjadi penting untuk dilindungi.

Kebudayaan menunjukkan ciri khas suatu bangsa atau suku, di wilayah Indonesia bagian Timur tepatnya di Bajawa Kabupaten Ngada, memiliki upacara adat tahunan yang biasanya diselenggarakan pada sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Masyarakat hukum adat Bajawa mengenal upacara adat ini dengan sebutan *reba*. *Reba* merupakan upacara adat warisan leluhur yang bertujuan untuk melakukan penghormatan dan ucapan rasa terima kasih terhadap jasa para leluhur. Upacara ini juga digunakan untuk mengevaluasi segala hal tentang kehidupan bermasyarakat pada tahun sebelumnya yang telah dijalani oleh masyarakat Ngada. Melalui upacara ini, keluarga dan masyarakat meminta petunjuk kepada tokoh adat untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik pada tahun yang baru. Umumnya upacara *reba* diwujudkan dalam bentuk tarian yang diiringi dengan nyanyian.

Upacara adat yang merupakan salah satu produk kebudayaan masyarakat, pada umumnya kaya akan nilai-nilai spiritual yang kemudian menjadi acuan tata prilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Upacara adat dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga upacara adat dan nilai-nilai spiritual tersebut perlu dijaga eksistensinya dari faktor-faktor eksternal

yang berpotensi mengancam keutuhannya. Lahirnya rezim hukum hak atas kekayaan intelektual menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan dalam memberikan perlindungan terhadap keutuhan suatu upacara adat.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil karya manusia yang berasal dari pemikiran intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, desain maupun bentuk-bentuk karya lainnya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Adapun beberapa Undang-Undang yang dibentuk akibat perkembangan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual diantaranya; Undang-Undang Hak Cipta/ *copyrights*, Paten, Merek/*trademark*, Desain Industri/*industrial design*, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/*layout design of integrated circuit*, Rahasia Dagang/*trade secret*, dan Perlindungan Varietas Tanaman Baru/*new variety of plant*.

Menurut Agus Sardjono (2010;58-59), secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat dipahami dalam dua pengertian; 1) dalam percakapan sehari-hari, Hak Kekayaan Intelektual mencakup segala sesuatu yang timbul dari aktivitas akal pikiran manusia (*human brain*), 2) dalam pengertian hukum, Hak Kekayaan Intelektual dapat dipahami sebagai hak yang dapat dituntut berkaitan dengan produk intelektual manusia (*Human Intellect*). Upacara *reba* sebagai sebuah seni tari tradisi masyarakat lokal Bajawa yang diwariskan secara turun temurun, merupakan produk intelektual manusia yang pada hakekatnya mengandung aspek Hak Kekayaan Intelektual. Hasil kreasi

intelektual tradisional tersebut secara umum disebut pengetahuan tradisional atau *traditional know ledge*.

Pengetahuan tradisional mengandung pengertian yang sangat luas, karena mencakup intelektual tradisional di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan serta karya intelektual dalam bidang industri (Arif Lutviansori, 2010:2). Berkaitan dengan pengertian pengetahuan tradisional yang luas itu, Arif menambahkan bahwa terdapat istilah lain yang disebut sebagai tradisi budaya atau folklor dan dalam beberapa tulisan lainnya baik pengetahuan tradisional maupun folklor digolongkan sebagai warisan budaya (*intangible cultural heritage*). Konsep Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia melindungi pengetahuan tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT). Menurut Dwi Martini (2014 : 456), ekspresi budaya tradisional lahir sebagai produk budaya yang proses penciptaanya tidak sekali jadi melainkan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya dan mewujud dalam berbagai karya yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota komunitas. Hal ini berarti bahwa baik folklor, warisan budaya maupun ekspresi budaya tradisional mengandung pengertian yang sama yakni mengacu pada seni tradisional. Upacara *reba* sebagai bagian dari upacara adat yang kental dengan unsur tradisionalnya serta diwariskan secara turun temurun, maka dapat disimpulkan bahwa upacara *reba* termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional.

Prinsip yang membedakan perlindungan Hak Cipta dengan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia (Suyud Margono, 21 : 2010). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui Undang-Undang hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum hak atas kekayaan intelektual. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Meskipun demikian, bukan berarti melalui Undang-Undang Hak Cipta tidak menemui masalah ketika persyaratan dan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta ekspresi budaya tradisional akan diterapkan, misalkan mengenai bagaimana jika suatu ekspresi budaya tradisional yang dikuasai oleh negara tidak asli atau original.

Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa sebuah ekspresi bukan merupakan ekspresi budaya tradisional, jika dalam penggunaannya tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Akibatnya ekspresi budaya tradisional tersebut lepas dari jangkauan perlindungan hukum hak cipta. Kedudukan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan untuk menentukan originalitas ekspresi budaya tradisional sebagai objek yang dilindungi hak cipta. Nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban menjadi faktor yang sangat penting, dalam hal ini nilai-nilai tersebut berkedudukan sebagai salah satu kriteria penentuan aspek originalitas atau keaslian dari ekspresi budaya tradisional itu sendiri, sehingga kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi tradisional menjadi lebih kuat.

Menurut pendapat Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski sebagaimana dikutip oleh Nasution dalam bukunya Ilmu Sosial Budaya Dasar, mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri/*cultural determinism* (Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, 2015 : hal 15). Hal ini berarti bahwa setiap masyarakat tidak harus mempunyai suatu kebudayaan yang sama. Letak geografis dan lingkungan sekitarnya turut mempengaruhi kebudayaan yang dimilikinya. Herskovits menambahkan bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, mengandung seluruh pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa perlindungan Hak Cipta ekspresi budaya tradisional, pada prinsipnya hendak melindungi nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pengembannya.

Upacara *reba* sebagai sebuah tradisi, hal utama yang dilindungi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan wujudnya. Senada dengan itu, Agus Sardjono menambahkan bahwa sesungguhnya tradisi tidak hanya terbatas pada proses (turun-temurun), tetapi juga mencakup adat istiadat yang tidak terlepas dari nilai atau pandangan hidup (*philosophical background*) masyarakat yang bersangkutan (Agus Sardjono, 2010 : 120).

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini, seharusnya mempermudah masyarakat pengembangan ekspresi budaya tradisional dalam melestarikannya, dengan tetap mempertahankan eksistensi nilai-nilai ekspresi budaya tradisional. Upaya pelestarian tersebut, tentu perlu diperhatikan dimana letak ekspresi budaya tradisional itu berada, dalam hal ini aspek wilayah keberadaan ekspresi budaya tradisional menjadi sangat penting karena memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat setempat. Pengembangan ekspresi budaya tradisional seharusnya mengikuti dimana letak ekspresi budaya tradisional tersebut berada, bukan ekspresi budaya tradisional yang mengikuti kemana masyarakat pengembangan berada. Akibat keterbatasan pandangan yang demikian, maka pada lima tahun terakhir yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 upacara adat *reba* bebas diadakan di luar wilayah hukum adat Bajawa oleh masyarakat Bajawa seperti yang dilakukan di Jakarta pusat dan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

Upacara *reba* yang dilakukan di luar wilayah hukum adat Bajawa, tentu sangat berpengaruh terhadap eksistensi nilai-nilai yang hidup dalam upacara

reba sebagai ekspresi budaya tradisional. Nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam wilayah masyarakat hukum adat Bajawa sebagai pengemban upacara *reba*, akan menjadi berbeda atau tidak sesuai jika upacara *reba* diadakan diluar wilayah hukum adat Bajawa, karena akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Akibatnya aspek originalitas upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta menjadi berkurang.

Pelaksanaan upacara *reba* di luar wilayah hukum adat Bajawa lambat laun dapat mengakibatkan kemunduran nilai-nilai originalitas dari upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional, misalnya perubahan tahapan-tahapan dalam upacara *reba* dan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan sebelum upacara *reba*. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan kesan modifikasi, yang mana modifikasi terhadap karya ciptaan menurut Undang-Undang Hak Cipta merupakan pelanggaran terhadap hak moral pelaku pertunjukan. Hukum hak cipta melekat hak ekonomi (*ekonomi rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Adrian Sutedi, 2009; 115). Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta huruf (b) menyebutkan; Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk tidak

dilakukannya distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. Modifikasi ciptaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak cipta adalah perubahan atas karya pelaku pertunjukan. Hal ini berarti bahwa, untuk melindungi upacara *reba* diperlukan otoritas yang berwenang dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban, di samping mengontrol terjadinya modifikasi, sehingga upacara *reba* tetap memenuhi kriteria ekspresi budaya tradisional yang merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta.

Upacara *reba* yang merupakan bagian dari upacara adat secara objektif telah memenuhi syarat untuk dijadikan ekspresi budaya tradisional, namun demikian dalam rangka memperoleh perlindungan dari negara yang kuat, maka perlu diperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban upacara *reba* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bertolak dari pemaparan yang dikemukakan di atas, maka untuk menelaah nilai-nilai dimaksud dapat diketahui bahwa aspek yang paling penting dalam menentukan eksistensi upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional adalah peran otoritas pemegang hak cipta ekspresi budaya tradisional dan kedudukan masyarakat pengemban ekspresi budaya tradisional. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini dapat diajukan rumusan judul “**peran**

Kepala Adat dan kedudukan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Adat dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta?
2. Bagaimana kedudukan masyarakat pengemban dalam melaksanakan upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi peran Kepala Adat dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta dan bagaimakah kedudukan masyarakat pengembannya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan masyarakat pengemban ekspresi budaya tradisional khususnya kedudukan dalam hal sebagai penyelenggara upacara *reba*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul peran Kepala Adat dan kedudukan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional diharapkan dapat memberikan manfaat;

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum bisnis dalam rangka menunjang pengembangan ilmu hukum hak atas kekayaan intelektual bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum serta Magister Ilmu Hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut;

- a) Bagi pemerintah daerah, agar penelitian ini menjadi acuan pemerintah dalam menginventaris upacara *reba* sebagai hak cipta ekspresi budaya tradisional.
- b) Bagi masyarakat adat Bajawa, agar penelitian ini dapat memperkuat fungsi Kepala Adat dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pemerintahan lingkup masyarakat hukum adat Bajawa dan memberi kepastian akan kedudukan masyarakat pengemban upacara *reba*, sehingga upacara *reba* tetap eksis menjadi ekspresi budaya tradisional Indonesia yang penting untuk dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “peran Kepala Adat dan kedudukan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional” merupakan ide dari penulis dan tidak

melakukan plagiat terhadap hasil penelitian dari penulis lain. Berdasarkan hasil penelusuran penulis maka terdapat beberapa penelitian yang hamper sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut adalah beberapa dari penelitian tersebut;

1. Arni Zakiah, Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar 2012, dengan judul “Perlindungan Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia (*I La Galigo*) dalam Praktik Pemanfaatan oleh Pihak Asing”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional *I La Ligo* oleh pihak asing dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas ekspresi budaya tradisional *I La Ligo* oleh pihak asing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional *I La Ligo*. Hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan pemerintah sebagai pemegang hak cipta atas *I La Ligo* sangat rendah sehingga menjadi tidak optimalnya perlindungan hak cipta *I La Ligo*. Budaya tradisional *I La Ligo* merupakan budaya hukum masyarakat yang masih bersifat komunal yang tidak diperdulikan oleh masyarakat apabila kesenian dan kebudayaan dimanfaatkan oleh pihak asing, bahkan merasa bangga atas pemanfaatan oleh pihak asing. Upaya penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena rendahnya

pengetahuan aparat penegak hukum atas pelanggaran hak cipta *I La Ligo*. Bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak merasa haknya dilanggar ketika hak cipta tersebut dimanfaatkan tanpa hak oleh pihak asing.

2. Julinda Idriaty, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini mengemukakan kewenangan untuk urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan palayanan dasar yakni kebudayaan, dalam hal ini ekspresi budaya tradisional, sehingga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekspresi budaya tradisional masih bersifat defensive. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asas perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional masyarakat Sulawesi Tenggara serta upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengelola ekspresi budaya tradisional apakah sejalan dengan prinsip-prinsip HKI dan asas otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara melindungi ekspresi budaya tradisional masyarakat adatnya berdasarkan konvensi UNESCO Tahun 2003 yakni perlindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda untuk mencegah kepunahan. Upaya yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara masih sebatas pencatatan sehingga ekspresi budaya tradisional yang terbesar diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara belum terkodifikasi secara komprehensif integrative.

3. Shabi Mahmashani, Program Studi Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010, dengan judul “Konsep Kepemilikan Folklor dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional. Penelitian ini mengungkapkan secara mendetail mengenai kelebihan dan kekurangan konsep kepemilikan folklor dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, RUU Ekspresi Budaya Tradisional dan konsep perlindungan folklor seperti apakah yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan peranan pemerintah dalam melindungi folklor yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
4. Arya Kaswara Saputra, Program Studi Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta tenun ikat sebagai kekayaan tradisional

Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis unsur budaya masyarakat yang juga menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenun ikat sebagai kekayaan intelektual tradisional Indonesia.

5. Febe Bachtiar, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta 2011, dengan judul “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklor) dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara.” Tesis ini mengkaji konsep perlindungan HKI dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi folklor ukiran Jepara yang optimal bagi keuntungan masyarakat lokal/adat Jepara dengan mengangkat pokok permasalahan tentang implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan hak terkait (*Neighbouring Rights*) pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara, apa yang menjadi kendalanya dan bagaimanakah mekanisme perlindungan yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum cukup mempresentasi hak terkait yang dimiliki oleh para pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara sebagai komunitas pemangku asli folklor Jepara. Hal ini disebabkan pengaturan folklor yang masih abstrak dalam UU Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan Hak Cipta atas karya folklor ukiran Jepara, sehingga

masyarakat Jepara belum dapat menikmati potensi ekonomi ukiran Jepara dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana *defensive protection*, serta perlindungan Indikasi Geografis.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Persamaan dengan penulis-penulis sebelumnya terletak pada objek penelitian yang dikaji yakni penulis meneliti tentang perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Perbedaan dengan penulisan tesis ini terletak pada titik fokus permasalahan yang dikaji. Peneliti sebelumnya lebih menitikberatkan pada konsep dan aspek regulasi serta bagaimana hambatan bagi penegak hukum yakni pemerintah dalam mengimplemntasikan regulasi yang ada untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, sedangkan dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat nilai-nilai yang ada dalam ekspresi budaya tradisional kemudian dikaitkan dengan kedudukan pemegang ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini menempatkan pemegang ekspresi budaya tradisional yakni Kepala Adat dan masyarakat pengemban sebagai pemegang peran yang paling urgent dalam melindungi ekspresi budaya tradisional, sedangkan kedudukan pemerintah hanya sebagai peran pendukung dalam menginventaris ekspresi budaya tradisional dengan memperhatikan regulasi yang ada.